

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA
BAGI MASYARAKAT**

(Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten
Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M. HUSAINI

NPM : 1421020193

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA
BAGI MASYARAKAT**

(Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten
Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
M. HUSAINI
NPM : 1421020193

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Perkembangan desa dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan sebagai efek dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memudahkan pelayanan publik. Desa Malang Sari merupakan salah satu dari beberapa desa yang merupakan desa pemekaran, kemajuan desa tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adanya peran kepala desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan suatu desa khususnya Desa Malang Sari. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *Interpretasi data* dan *sistematika data*, kemudian data dianalisis dengan *kualitatif* dengan cara berfikir *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yaitu terjadi peningkatan yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pengurusan berkas oleh aparat desa. Kemudian mengenai sarana dan prasarana di Desa Malang Sari telah mengalami peningkatan, seperti perbaikan sarana transportasi yaitu jalan, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang terjadi akibat pemekaran desa, hal ini tentu saja tak lepas dari kompetensi pelaksana yang mumpuni dengan rasio yang sesuai karena pembagian kewilayahan desa pasca pemekaran. *Kedua*, menurut tinjauan *fiqh siyasah*, dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, di mana dalam *fiqh siyasah* pemerintah mempunyai kewajiban dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini Desa Malang Sari setelah mengalami pemekaran desa menjadi lebih baik dalam pengurusan berkas, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik berkat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M HUSAINI
NPM : 1421020193
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”** Adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar lampung, 25 Oktober 2020



M HUSAINI
NPM. 1421020193



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : M. HUSAINI

NPM : 1421020193

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

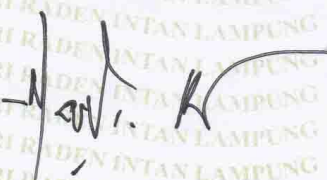
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi: **TINJAUAN *FIQH* SIYASAH TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **M. HUSAINI**, NPM: **1421020193**, Jurusan: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

Sekretaris : **M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.** (.....)

Penguji II : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Jalaluddin, M.H.
196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ ۱۱

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS ar-Rad [13]: 11)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Fadilah Umar dan Ibundaku Sarama Wati, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

M. Husaini, dilahirkan di Pahiton Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 13 Desember 1992, anak ke-4 dari 12 bersaudara dari pasangan Fadilah Umar dan Sarama Wati

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 3 Way Ngisom Kecamatan Batu Kebayan lulus pada tahun 2006, melanjutkan ke SMPN 2 Sekincau, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMAN Sekincau, lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat** (Studi di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah).
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2014.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2020
Penulis,

M. HUSAINI
NPM. 1421020193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	15
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	17
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	18
4. Konsep Pemekaran Wilayah dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	34
B. Pemekaran Desa	37
1. Pengertian Pemekaran Desa	38
2. Konsep Pemekaran Desa	39
3. Kebijakan & Strategi Pemekaran Desa	42
C. Tinjauan Pustaka	46

BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan	49
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Malang Sari	49
2. Letak Geografis Desa Malang Sari	50
3. Keadaan Demografis Desa Malang Sari	51
4. Struktur Organisasi Desa Malang Sari	54
B. Kondisi Desa Malang Sari Sebelum Pemekaraan	54
C. Dampak positif Pemekaran Desa bagi Masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung	

Selatan	60
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Dampak positif Pemekaran Desa bagi Masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan	72
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> dampak positif Pemekaran Desa bagi Masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: “**Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat** (Studi di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)” untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk memahami skripsi ini, sehingga dengan adanya penegasan judul diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Tinjauan adalah pemeriksaan, teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mencegah suatu persoalan.¹

Fiqh siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarnya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1157.

² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.42.

Dampak yaitu sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian.³

Pemekaran desa menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti, berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus dan mulai timbul dan berkembang.⁴ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, dan/atau hak teradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Desa Malang Sari adalah salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Sari yang terdiri dari 8 desa dan memiliki Jumlah Penduduk 3.643 orang 885 kartu keluarga. Desa Malang Sari merupakan desa yang baru saja melakukan pemekaran dimana sebelumnya desa ini masih jadi bagian dari desa Kerto Sari, Berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan berbagai unsur masyarakat lainnya, maka pada Tanggal 14 Februari 2012 desa tersebut menyepakati untuk pemekaran menjadi desa baru, yaitu desa Malang Sari. Desa Malang Sari juga merupakan desa paling ujung di Kecamatan Tanjung Sari, sehingga letaknya berbatasan antara kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur. Jadi pemekaran desa adalah pemecahan atau pemisah diri dari daerah induknya, kemudian membentuk daerah baru baik

³ *Ibid.* h. 457.

⁴ Tri Rahmawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 19.

⁵ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 2.

Provinsi, Kabupaten dan Desa dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan istilah-istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat** (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan) adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan memilih judul tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian.

Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau bagaimana dampak pemekaran desa di desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

2. Alasan Subjektif

a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menjadi penunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

⁶ Data Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan 2017

- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Dalam tingkatan inilah desa diharuskan mempunyai tata ke pemerintahan yang disusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadi desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa.⁷

Suatu desa harusnya terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintah desa. Pemerintah desa tersebut terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh aparat desa. Pemerintah desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa dalam segala bidang, diantaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan pedesaan itu desa akan menjadi maju, dan masyarakat sekitar akan mendapatkan dampak yang positif.⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), h. 494.

⁸ *Ibid.* h. 494-495.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing.⁹

Pemekaran Desa pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan kata lain meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa yang di mekarkan.¹⁰

Perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya “desa asli” sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geografi maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

⁹ HAW Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

¹⁰ *Ibid.* h. 4-5.

atau *village* diartikan sebagai *agro up sofhou sesorshopsina country area, smallerthan a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.¹¹

Penyelenggaraan disuatu desa diperlukan adanya organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar dan filsafat pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan

¹¹ Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum....*, h. 492.

sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat mau ditingkat daerah.¹² Sesuai dengan firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS an-Nisa [04]: 59)

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir *Al-Misbah*-nya menyebutkan, bahwa “Taatilah Allah dan beramallah dengan berpedoman kitab Allah dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para rasul itu bertugas untuk menjalankan syari’at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rasul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atau kaum muslimin untuk mentaati rasul.”¹³

Perkembangan desa dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan yang efek di keluarkannya undang-undang desa. Tujuan utama pemekaran

¹² M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana, 2002), h. 9.

¹³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 585.

desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memudahkan pelayanan publik. Desa Malang Sari merupakan salah satu dari beberapa desa yang merupakan desa pemekaran, kemajuan desa tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adanya peran kepala desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan suatu desa khususnya desa malang sari. Namun kepala desa yang mempunyai peran yang sangat penting dan bertanggung jawab karena kepala desa memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa, serta berhak mengatur desa demi terlaksana dan tercapainya kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat desa malang sari dan masyarakat pun ikut membantu dan mendukung pembangunan desa sehingga tercapainya tujuan pemekaran desa. Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah desa baru yang mengalami pemekaran dampak yang beragam dalam hal ini akan difokuskan pada dampak positifnya. Dengan menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai salah satu kajian, mengingat bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* begitupun termasuk didalamnya yaitu hukum Islam.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan memilih judul: **Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat** (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan setelah melakukan pemekaran desa serta ditinjau dari *fiqh siyasah* sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya bermanfaat bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan mengenai dampak dari pemekaran desa, dan umumnya bagi masyarakat di provinsi Lampung.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁴ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁵ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.¹⁶

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar, 2006), h. 3

¹⁵ *Ibid.* h. 7.

¹⁶ *Ibid.* h. 105.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan teori yang membahas tentang pemekaran desa. .

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.¹⁷ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Observasi yang dilakukan di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58

¹⁸ *Ibid.* h. 154

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. *Interpretasi data* yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. *Sistematikasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis

¹⁹ *Ibid.* h. 154.

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁰

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.643 orang atau semua Masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan diantaranya adalah perangkat pemerintahan desa seperti, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Bendahara, Kadus dan perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan seperti Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa lainnya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang di ambil

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 26.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2016), h. 80

karena pertimbangan tertentu.²² Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu berjumlah 27 orang yang terdiri dari, 1 Kepala Desa, 2 orang Perangkat Desa, 6 orang Tokoh agama dan tokoh Masyarakat, dan 18 orang Masyarakat Desa.

6. Analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan cara berfikir *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²³



²² *Ibid.* h. 81.

²³ *Ibid.* h. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yaitu terjadi peningkatan yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pengurusan berkas oleh aparatur desa. Kemudian mengenai sarana dan prasarana di Desa Malang Sari telah mengalami peningkatan, seperti perbaikan sarana transportasi yaitu jalan, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang terjadi akibat pemekaran desa, hal ini tentu saja tak lepas dari kompetensi pelaksana yang mumpuni dengan rasio yang sesuai karena pembagian kewilayahan desa pasca pemekaran.
2. Menurut tinjauan *fiqh siyasah*, dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, di mana dalam *fiqh siyasah* pemerintah mempunyai kewajiban dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini Desa Malang Sari setelah mengalami pemekaran desa menjadi lebih baik dalam pengurusan berkas, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik berkat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

B. Rekomendasi

1. Bahwa terkait pemekaran Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari dapat dijadikan rujukan atau contoh dalam melakukan pemekaran desa di tempat yang lain.
1. Pentingnya memahami tentang Islam terkait pemekaran desa, maka hasil penelitian ini dalam perspektif *fiqh siyasah* dapat dijadikan rasionalisasi hukum untuk pemekaran desa di tempat yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: CV. Toha Putra, 2000

M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Al-Hadis

Al-Yamamah, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah, *Shahih Al-Bukhari* Beiriut, 2001.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Juz IX* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

C. Buku

Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi* Bandung: Alfabeta, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.

Data Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan 2017.

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Haeruman, *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah* Jakarta : Prisma, 2001.

Hasibuan, Albert, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)* Jakarta: Swadaya, 2002.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Jeddawi, Murtir, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)* Yogyakarta: Total Media, 2009.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2006.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam* Jakarta: Karya Toha Putra, 2000.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Rahmawati, Tri, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shiddiqy, Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddiqy, Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan: 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta 2016.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* Jakarta: PT Logos Wacana, 2002.
- Syarif, Ibnu, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta, Bulan Bintang: 2003.
- Ubaedillah, A., *Pendidikan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia, dan Masyarakat madani* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Widjadja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

D. Jurnal

Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Petita*, Vol. 2 No. 1 (April 2017).

Fajarni, Suci, “Pelaksanaan *Siyasah Syar’iyyah* di Aceh”. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015).

Hakim, Dani Amran, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dalam Perspektif *Fikih Siyasah Dusturiyah*”. *Tanjungpura Law Jurnal*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020).

Jafar, Wahyu Abdul, “*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”. *Al-Imarah*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2018).

Rusfi, Mohammad, “Validitas *Maslahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum”. *AL-‘ADALAH*, Vol. XII No 1 (Juni 2014).

